

***STRATEGI PENGELOLAAN ALOKASI DANA NAGARI (ADN) TAHUN ANGGARAN 2021
PADA MASA PANDEMI COVID 19 DINAGARI KOTO TANGAH BATU AMPA KECAMATAN
AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT***

Muhammad Ainur Ridho

NPP. 29.1651

Asdaf Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: riidhoo28@gmail.com

ABSTRACT

Nagari Koto Tengah Batu Ampa is a Nagari located in Akabiluru District, Fifty Cities Regency. The emergence of the outbreak of the 2019 corona virus disease resulted in the reallocation of the use of the Village Fund in 2021. In connection with the emergence of COVID 19, of course, the Nagari Fund Allocation also underwent changes. This study aims to identify, understand, and describe the allocation of Nagari Funds in Nagari Koto Tengah Batu Ampa, Akabiluru District, Lima Puluh Kota Regency. The research method. **Purpose:** used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. While the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Determination of informants in interviews using a purposive sampling procedure. **Method :** The research used is a qualitative descriptive method with an inductive approach. While the data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Determination of informants in interviews using a purposive sampling procedure. **Result :** Efforts made by the Regional Government and Village Government in overcoming obstacles to managing direct cash assistance from village funds are to determine and verify data on recipients of direct cash assistance from village funds on a regular basis and coordinate with distributors to be able to assist in non-cash distribution. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, it was found that in general the condition of the Village Apparatus thoroughly understands the distribution and management mechanism of the Village Fund Allocation of Village funds based on Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management, both from the planning stage to accountability. However, there are still some obstacles in its implementation.

Keywords: ADN, Covid 19

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang : Nagari Koto Tengah Batu Ampa merupakan Nagari yang terletak di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota . Munculnya peristiwa tersebarnya penyakit korona virus 2019 mengakibatkan realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2021. Terkait Dengan kemunculan COVID 19 tentunya Alokasi Dana Nagari juga mengalami perubahan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan Alokasi Dana Nagari di Nagari

Koto Tangah Batu Ampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota. **Metode** :Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penentuan informan pada wawancara menggunakan prosedur purposive sampling. **Hasil/Temuan**:Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa secara umum kondisi Perangkat Desa memahami secara menyeluruh terkait penyaluran dan mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Nagari dana desa yang berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa baik dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. **Kesimpulan**: Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Nagari telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di Nagari Koto Tangah Batu Ampa.

Kata kunci: Alokasi Dana Nagari, Covid 19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era milenial saat ini, Indonesia sedang berada dalam proses membangun pemerintahan yang lebih baik, yaitu pemerintahan yang menuju good governance dan clean government. Pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi cita – cita bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan suatu daerah dilihat dari hasil pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan. Menurut Undang – Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah merupakan “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dalam proses penyelenggaraan otonomi daerah yang dimaksud, yang dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam penyelenggaraanya pemerintah berkewajiban menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat masyarakat yang ada di daerah masing-masing, dan juga pengelolaan keuangan publik. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu meningkatkan kapabilitas dan efektifitas. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya masing – masing. Dengan cara membuat program – program pembangunan yang memiliki dampak bagi masyarakat sekitar.

Menurut Mardiasmo (2004;230) menyatakan bahwa: “Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ialah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan otonomi fiscal dan desentralisasi fiscal. Desentralisasi fiscal memberi kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Implementasi desentralisasi fiscal telah membawa konsensus perubahan terhadap manajemen fiscal daerah yang mana tercermin dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan konsensus yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan. Dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkelanjutan”. Desentralisasi merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah “penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pelaksanaan sistem informasi keuangan masih ada beberapa kendala dan hambatan yang perlu diperbaiki, agar sistem informasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Penyebabnya berupa adanya kendala teknis dan terbatasnya sumber daya aparatur yang menguasai keahlian dibidang keuangan, dan juga dalam bidang teknologi informasi sehingga menyebabkan penyesuaian penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) mengalami kendala dan hambatan.

Dalam membangun sistem informasi keuangan yang baik, maka dibutuhkan sumber daya aparatur yang bisa menguasai keahlian di bidang keuangan dan juga pada bidang teknologi informasi. Penjelasan dari staff bagian pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan masih ditemukan sebagian pegawai pemerintah kabupaten, kecamatan, maupun nagari yang belum mahir dan mampu dalam pengelolaan sistem ini. Selain diperlukannya sumber daya yang ahli dalam bidang teknologi informasi, untuk membangun sistem informasi yang handal juga dibutuhkan biaya. Pemeliharaan aplikasi membutuhkan biaya yang besar. Kemampuan penganggaran sangat dibutuhkan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang dapat menunjang SIPKD, serta untuk membeli dan memperbaharui sistem secara berkala. Menurut operator SIPKD, permasalahan yang sering timbul dan sangat berpengaruh ialah adanya gangguan jaringan. Terkadang koneksi jaringan yang digunakan tidak stabil dan sering terputus. Apabila terjadi gangguan sistem pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, maka sistem yang lain ikut terganggu dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan SIPKD, sehingga dengan adanya kendala tersebut menyebabkan adanya keterlambatan seperti pada bagian pelaporan keuangan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan maupun konteks sistem informasi. Suci WuIandari (2019) Analisis pengelo - laan alokasi dana desa terhadap kesejah - teraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam Metode kualitatif dengan hasil Pada pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Rejosari Mataram ini ada beberapa desa yang kurang baik secara Pelaksanaan - nya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif yaitu Dusun Rejo Basuki Rejo Mukti, Rejo Agung, Rejo Murni, Rejo MuIyo, Rejo inangun, Dan Rejo Asri, sedangkan desa yang pelaksanaanya sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu Dusun Rejo Katon Dan Dusun

(Yulia, 2017),

. Penelitian Yuswardi menemukan bahwa pelatihan, pemanfaatan SIPKD, kompetensi dan pengendalian intern secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SIPKD dan Gaya kepemimpinan tidak mampu memoderasi hubungan antara pelatihan, pemanfaatan SIPKD, kompetensi dan pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD (Yuswardi, 2017). Penelitian Ayu dan Suyana menemukan bahwa penerapan SIPKD dapat berjalan efektif karena kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan dan kualitas SDM secara langsung berpengaruh positif signifikan terhadap keupasan pengguna dan berpengaruh positif terhadap manfaat bagi organisasi (Ayu dan Suyana, 2018).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni bagaimana dampak dari sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah, metodenya yang digunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif yang berbeda dengan penelitian Yulia, Yuswardi, maupun Ayu dan Suyana.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa saja pendukung perangkat Pemerintahan di Nagari dalam pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) di Nagari Koto Tengah Batu Ampa yang ada di Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota selama pandemi COVID 19

II. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan melalui pendekatan induktif. Dalam tipe kualitatif ini Anggito dan Setiawan (2018: 7), memberi pernyataan bahwa penelitian yang bersifat kualitatif digunakan dalam latar alamiah yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang dilakukan dan terjadi yang melibatkan berbagai macam metode yang ada.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, sekretaris BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan, kabid anggaran, kabid akuntansi, admin SIPKD, dan operator SIPKD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis dampak sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan pendapat dari Hartono yang menyatakan bahwa dampak dalam pemanfaatan SIPKD ada terjadinya permasalahan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Dampak Sistem Informasi Keuangan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peneliti melakukan penelitian terhadap dampak sistem informasi keuangan terhadap bagaimana pengelolaan keuangan daerah, apakah sudah berjalan efektif atau belum.

Dampak dari penggunaan SIPKD telah memberikan manfaat yang luar biasa terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terkhusus Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai pusat pengelola keuangan daerah. BPKPAD dengan mudah menginput data dari OPD lainnya yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun masih ada kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut, namun manfaatnya sudah bisa dirasakan.

Sebelum adanya SIPKD, Kabupaten Pesisir Selatan mengelola keuangan dengan cara manual, yaitu menggunakan Microsoft Excel. Proses yang secara manual tentu membutuhkan waktu yang lama, karena harus mengentri data satu persatu dari setiap OPD ke dalam pencatatan. Setelah adanya SIPKD, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan beranjak dari manual ke penggunaan aplikasi SIPKD ini dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dengan harapan dapat memperbaiki pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebelumnya.

Menganalisa efektivitas SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu dengan menghubungkan hasil wawancara, observasi atau pengamatan di lapangan, serta dokumentasi, dengan menggunakan Teori Hartono (2013) Teori ini mengemukakan bahwa sistem informasi berbasis komputer dapat dikatakan memberikan dampak yang efektif apabila memenuhi beberapa faktor yang terdiri dari dimensi organisasi, manajemen, teknologi serta pengelolaan keuangan.

Berdasarkan analisis dimensi-dimensi tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, terkhusus pada bidang keuangan. Manfaat tersebut antara lain yaitu adanya efisien waktu dalam mengerjakan pengelolaan keuangan, pimpinan dengan mudah mengontrol realisasi anggaran, mempermudah pemerintah dalam membuat laporan keuangan dengan tampilan laporan keuangan yang sudah bagus dan dengan sistem yang telah teratur secara otomatis dengan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan, bahkan dampak penggunaan SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan adalah kurangnya kemungkinan salah angka pengelolaan keuangan lebih akuntabel, karena pada SIPKD akan otomatis mengoreksi kesalahan data yang dientri oleh operator. Namun dampak dari SIPKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan masih belum tinggi, karena disebabkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghalang untuk mewujudkan dampak yang baik dari SIPKD. Setiap dimensi yang ada, masih terdapat indikator yang belum maskimal.

3.2. Faktor Penghambat SIPKD terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Meskipun SIPKD telah banyak membantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, namun dalam penggunaan aplikasi SIPKD, Kabupaten Pesisir Selatan masih menemukan berbagai hambatan.

SDM adalah salah satu faktor utama dalam pengoperasian SIPKD. Dampak SIPKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan hasil observasi saat penelitian, dapat diidentifikasi bahwa Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki pegawai yang belum mahir dalam bidang akuntansi. Hal ini membuat keterlambatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1

Data pegawai Tim Pelaksana SIPKD

No	Nama	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai	Kedudukan dalam Tim
1	Lusiana, S.Kom, MM.	S2	PNS	Super Admin
2	Nurzarly, A.md	D3	PNS	Admin
3	David Dwira Astradedy, A.md	D3	PNS	Admin
4	Tiara Yusiani, S.Kom	S1	PNS	Admin
5	Reni Dahlia, S.E	S1	PNS	Admin

Sumber: BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan

Dapat dilihat dari tabel 1 bahkan operator SIPKD di beberapa OPD yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan ada yang tidak mahir dalam pengoperasian SIPKD. Hal ini akan mengakibatkan pusat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Badan Pengelolaan Keuangan

Pendapatan dan Aset Daerah akan membutuhkan waktu yang lama dalam mengentri data dari OPD tersebut. Sehingga terjadilah ketidak efektifan dan efisiennya.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan sendiripun belakangan ini sering terjadi mutasi pegawai, sehingga terjadi pergantian operator dan admin SIPKD di beberapa OPD. Admin dan operator baru belum tentu mengerti dan mahir akan pengoperasian SIPKD sehingga butuh banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan pengamatan penulis saat penelitian, ada beberapa admin dan operator SIPKD beberapa OPD yang datang langsung ke pusat pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Maksud dari kedatangan operator OPD di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah adalah untuk belajar dan bertanya tentang pengoperasian SIPKD. Sehingga Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Dearah Kabupaten Pesisir Selatan mengajari satu-satu dari setiap operator yang datang.

Budaya yang kurang baik dan telah turun temurun dikehidupan pegawai, susah untuk dihilangkan. Pada umumnya pegawai cepat datang hanya untuk absen, setelah itu keluar lagi, dan akhirnya masuknya telat. Padahal dalam aturan disiplin pegawai, tidak ada pegawai yang telat masuk, namun itu hanya sekedar peraturan saja, tidak dijalankan. Budaya kurang disiplin salah satu faktor yang akan menjadi kendala bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan yang telah diimpikan. Dalam bidang keuangan yaitu menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, melalui peningkatan keefektivan dan efisien suatu aplikasi dalam mengelola keuangan.

Hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemui bahwa dalam penyelenggaraan SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan kadang terkendala. Hal ini diakibatkan karena terkadang saat penggunaan aplikasi, jaringan tidak terkoneksi, meskipun terkoneksi tetapi loadingnya lama, mengakibatkan perlunya waktu yang lama dalam melakukan penginputan data. Kondisi ini terjadi karena *wireless* yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki kapasitas yang rendah. Gangguan jaringan juga dapat terjadi apabila sistem digunakan oleh banyak operator dan mengakibatkan sistem sering error, dan kemudian operator harus melakukan *restart* dan *log in* berulang kali pada sistem.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat penelitian di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, fasilitas pendukung penggunaan SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah ada beberapa yang rusak. Seperti halnya komputer di ruangan bidang akuntansi ada yang rusak, sehingga hal ini mengakibatkan pegawai yang menggunakan komputer tersebut pekerjaannya tertunda, dan untuk mengatasinya pegawai tersebut menggunakan laptop sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan pekerjaan. Penyajian informasi SIPKD juga belum disajikan secara lengkap dan jarang di-*update* pada website Kabupaten Pesisir Selatan. Padahal seharusnya output dari SIPKD dapat diakses pada website kabupaten, sehingga masyarakat dapat mengetahui pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat membutuhkan keterbukaan informasi terkait dengan kinerja pemerintahan, sehingga pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Guna untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang trasnparan dan akuntabel.

3.3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Menghadapi Kendala Penyelenggaraan SIPKD

Suatu masalah yang terjadi dalam roda pemerintahan, harus segera di atas dan diselesaikan, agar sistem pemerintahan tetap berjalan dengan lancar efektif dan efisien. Jika membiarkan suatu masalah yang ada, maka tujuan dari suatu pemerintah tidak akan tercapai. Meskipun sudah ada aplikasi, namun Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan keuangan masih tetap melakukan secara manual. Hal ini dilakukan untuk jaga-jaga apabila hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti terganggunya atau *error* nya sistem. Penggunaan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, masih ditemukan kendala dalam berbagai macam bidang. Hal ini tidak boleh dibiarkan pemerintah. Tercapainya tujuan dari aplikasi dan tujuan dari pemerintah, maka pemerintah harus melakukan upaya agar masalah yang terjadi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Berbagai cara dilakukan pemerintah agar meningkatnya efektivitas penggunaan SIPKD adalah berupa melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD, memperbaharui cara rekrutmen SDM, meningkatkan disiplin pegawai, serta pengoptimalan terhadap jaringan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Sistem informasi keuangan memberikan banyak dampak positif bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan salah satu manifestasi nyata yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri. Peneliti menemukan temuan penting yakni sumber daya manusia sangat mempengaruhi bagaimana jalannya SIPKD, karena dibutuhkan sdm yang menguasai sistem informasi dan akuntansi sekaligus. Sama halnya dengan temuan Ayu dan Suyana bahwa kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna SIPKD, hal ini didukung dengan kualitas SDM dari faktor pendidikan yang baik sehingga percaya diri pengguna SIPKD dalam pengoperasionalan sistem informasi sehingga meningkatkan kepuasan bagi pengguna sistem (Ayu dan Suyana, 2018), sumber daya manusia adalah kunci berjalannya SIPKD di Kabupaten Pesisir Selatan.

Layaknya sistem informasi lainnya, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah penyampaian informasi bagi publik belum lengkap *ter-update* semuanya di *website* kabupaten, salah satunya dikarenakan belum ada data yang diberikan oleh BPKPAD kepada pihak pengelola informasi dan komunikasi, layaknya temuan Yuswardi (Yuswardi, 2017). Selanjutnya karakteristik dari sistem informasi ini yakni sistem informasi inimembutuhkan jaringan yang stabil, jadi SIPKD merupakan sistem aplikasi keuangan daerah yang beroperasi secara online. Sehingga dalam pengoperasiannya, menggunakan jaringan. Jaringan sangat berpengaruh terhadap efektivitas SIPKD dalam pengelolaan keuangan daerah. Jaringan yang dibutuhkan dalam penggunaan SIPKD ini adalah jaringan yang bagus, apabila terdapat masalah dalam jaringan, maka akan pengelolaan keuangan daerah akan terhambat. Hal ini mengakibatkan tujuan dari SIPKD sulit untuk diwujudkan. sesuai dengan hasil penelitian Agustino (Ayu dan Suyana, 2018).

Sistem informasi ini diperlukan fasilitas yang mendukung karena akan menyimpan arsip dari bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah selama sistem ini masih berjalan layaknya penelitian Yulia, menemukan bahwa fasilitas yang baik dapat mendukung jalannya sistem informasi ini sehingga kemungkinan terjadinya kendala dalam pengelolaan keuangan menjadi sangat kecil (Yulia, 2017).

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa dampak penggunaan SIPKD terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam beberapa dimensi yang ada masih terdapat masalah pada Dimensi Organisasi dan Dimensi Teknologi, sedangkan pada Dimensi Manajemen sudah berjalan dengan baik. Selain itu faktor yang dapat menghambat jalannya SIPKD yaitu kualitas SDM, sikap kurang

disiplinnya pegawai, permasalahan dalam jaringan, fasilitas yang kurang mendukung, serta informasi yang belum ter-update di *website* kabupaten. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menghadapi hambatan tersebut dapat berupa, dengan melakukan pelatihan bagi pegawai mengenai pengoperasian SIPKD, memperbaharui cara rekrutmen SDM dalam mengelola SIPKD dan memberikan syarat serta batas kemampuan bagi calon pegawai kontrak yang mengajukan lamaran, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga akan meningkatkan disiplin pegawai dengan cara memberikan peringatan kepada pegawai yang kurang disiplin dan akan menindak tegas pegawai yang masih kurang disiplin dengan memberikan berupa sanksi. Kabupaten Pesisir Selatan akan memperbaiki jaringan dengan menambah kapasitas jaringan melalui kerjasama dengan pihak Telkom, Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan perbaikan kerusakan pada fasilitas pendukung SIPKD dan mengganti fasilitas yang sudah rusak dengan yang baru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori Hartono.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan dampak sistem informasi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Ekaputra, N. D 2021. *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam penyusunan Dokumen RKPD di Kabupaten Nganjuk*. Kediri: Universitas Islam Kediri
- Elsye, Rosemarry. 2016. *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Fadhallah. 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.
- Gainau, M. B. 2016. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harefa, Mandala. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hartono, Bambang. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.
- AfrizaI. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Djaenuri , Aries 2012. *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Graha Indonesia
- Hasibuan, MaIayu. 2006. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Edisi Revisi). Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Iexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nasution, ZuIkarimen. 2012. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Noor, Juliansyah . (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

Rozaki, dkk. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
Sadyohutomo, MuIyo. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. *“Metodologi Penelitian”*. Yogyakarta. Penerbit Andi

